

Wali Kota Tetapkan 10 Paket Strategis



Sumber gambar: Kaltim Post Jumat, 04/04/2025

Pertimbangkan Regulasi Nasional dan Daerah

BONTANG - Keputusan penetapan paket strategis ini juga ditandatangani oleh sejumlah pejabat penting. Termasuk Wakil Wali Kota Agus Haris, Sekretaris Kota Aji Erlynawati, serta jajaran terkait. “Paket strategis ini mencakup program-program dengan nilai anggaran terbesar di lingkungan Pemerintah Kota Bontang,” kata Neni.

Tujuannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keputusan ini didasarkan pada berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk Undang-Undang 21/2023 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Perda Kota Bontang 3/2021 tentang RPJMD 2021-2026.

Pemkot Bontang memastikan bahwa setiap program dalam paket strategis 2025 akan diawasi ketat guna menghindari penyimpangan dan memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Jika terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan, pemerintah berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan.

“Dengan penetapan ini, diharapkan pembangunan Kota Bontang semakin maju, transparan, dan berdampak nyata bagi warga,” ucapnya.

10 paket strategis ini mencakup proyek yang diusulkan melalui Bankeu Pemprov Kaltim maupun APBD Bontang. Khusus Bankeu meliputi peningkatan saluran drainase di Kanaan dengan pagu anggaran Rp53,6 miliar, peningkatan saluran drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah Rp28,6 miliar, serta peningkatan saluran drainase Jalan HM Ardans Rp23,7 miliar.

Sementara proyek lain yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) berasal dari APBD Bontang yakni pembangunan *off-take* Telihan dan jaringan interkoneksi dari *off-take* Telihan menuju WTP Bhayangkara senilai Rp23 miliar, rehab Jalan Arief Rahman Hakim Rp13,2 miliar, rehab parsial empat ruas jalan kota Rp10,1 miliar, dan rekonstruksi Jalan Tari Jepen Guntung senilai Rp1,3 miliar.

Satu proyek ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni pembangunan gedung Laboratorium Uji Lingkungan senilai Rp9,5 miliar. Serta dua pembangunan infrastruktur garapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yakni pembangunan lanjutan

RKB SMP 1 dengan pagu anggaran Rp3,5 miliar dan RKB SD 007 Bontang Utara Rp10,7 miliar. (ak/kri)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Wali Kota Tetapkan 10 Paket Strategis, 04/04/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, 10 Paket Strategis Tahun Ini Ditetapkan, Prioritaskan Pembangunan Kota Bontang, 03/04/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
2. Dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (3) UU 23/2014 bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
3. Dalam Pasal 274 UU 23/2014 diatur bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.
4. Dalam Pasal 358 UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan.
 - (2) Rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.
 - (3) Perencanaan pengelolaan dan pengendalian perkotaan penyelenggaraan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional.
5. Dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 bahwa wali kota melalui kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan, penelitian, dan pengembangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan untuk memastikan bahwa Renstra perangkat daerah berjalan sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026.